

ABSTRAK

Penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai porsi yang paling besar. Untuk meningkatkan investasi dan ekspor, pemerintah memberikan fasilitas Kawasan Berikat. Di Kawasan Berikat diberikan penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut PPN dan PPnBM. Setiap perusahaan di Kawasan Berikat wajib mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu salah satunya tentang batasan maksimal penjualan hasil produksi ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2012 tentang Kawasan Berikat sebesar 25% dari jumlah realisasi ekspor dan penjualan ke Kawasan Berikat lain periode sebelumnya.

Penelitian ini membahas tentang “Evaluasi Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 atas Prosentase Penjualan Hasil Produksi Perusahaan di Kawasan Berikat (Studi Kasus PT.X)“, dimana ada perubahan prosentase batasan kuota penjualan ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) menjadi sebesar 25%.

Pendekatan kualitatif yang digunakan bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis mengenai nilai penjualan yang terjadi pada PT.X selama periode 2012 melalui analisis dokumen berupa laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bagaimana penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.04/2011 atas prosentase penjualan hasil produksi pada PT.X dan hal-hal yang membuat belum diterapkannya peraturan tersebut terkait dengan batasan prosentase penjualan ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya.

Kata Kunci : Kawasan Berikat, Fasilitas PPN

ABSTRACT

State revenue from the tax sector has the largest portion . To increase investment and exports , the government provides facilities Bonded Zone. In Bonded Zone given the suspension of import duty, excise duty exemption , VAT and luxury sales tax is not collected . Every company in Bonded Zone must comply with the rules that have been created by the government is one on the maximum limit the sale of products to Other Indonesian Customs area in accordance with the Regulation of the Minister of Finance No. 147/PMK.04/2011 as amended by Regulation of the Minister of Finance No. 120/PMK.04/2012 about Bonded Zone amounted 25% of total exports and sales realization to another Bonded Zone previous period .

This study discusses the " Evaluation of Implementation Regulation of the Minister of Finance No. 147/PMK.04/2011 over Percentage Sales results Productions Company in Bonded Zone (PT.X Case Study) " , where there is a change in the percentage of sales quota to Other Indonesian Customs area (DPIL) amounted to 25 % .

The qualitative approach used is to describe systematically the value of sales on PT.X that occurred in the period 2012 through analysis of the documents comprising the financial statements of the company .

Based on this study it can be seen how the application of the Regulation of the Minister of Finance No. 14/PMK.04/2011 over percentage sale results of products on PT.X and the things that make the application of these rules is not related to the percentage limit sales to other Indonesian customs area .

Keywords : Bonded Zone , VAT facility